

Pola Komunikasi Politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v4i2.137>

Indah Laila Rahma^{1*}, Megandaru Widhi Kawuryan²,

¹Pascasarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi
Jl. Wijaya II, No 62 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 - Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 20, Jatinangor, Sumedang 45363 - Indonesia

*Email Korespondensi: megandaru@ipdn.ac.id

Submitted: 19/10/2021, Revised: 30/11/2021, Accepted: 31/12/2021

Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstract

To realize development participation the role of political communication is very important, where all development activities carried out by the government and stakeholders cannot be separated from political communication, but the problem is, not all individuals, groups, and communities understand the communication patterns carried out in a particular community, again in rural areas. This study aims to describe the pattern of government political communication in an effort to increase participation in the development of Self-help Housing Stimulant Assistance in Ngrandah Village, Toroh District, Grobogan Regency. This research approach is qualitative. The research method in this study is the case study method. Data collection was carried out through the stages of observation, in-depth interviews, triangulation, documentation. To analyze of the data, it was carried out through six steps. First, processing and preparing the data for analysis. Second, read the entire data. Third, analyzing in more detail through coding. Fourth, create a theme based on the results of the categorization according to the research objectives. Fifth, present a report in the form of a qualitative description/narrative. Sixth, interpreting or interpreting the data that is already available. The results of this study found that the pattern of political communication took place in two directions, namely top-down and bottom-up. In this study, it can be seen that the role of the Village Head is quite dominant, the Village Head chooses communication in the form of direct discussion (dialogue) with the community in a transactional manner, but unfortunately, the participation of the Ngrandah village community in the BSPS assistance fund program is still low.

Keywords: political; political communication; participation; communication patterns; house building

Abstrak

Untuk mewujudkan partisipasi pembangunan, peran komunikasi politik sangat penting. Semua aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan pemangku kepetingan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi politik, namun permasalahannya tidak seluruh individu, kelompok dan masyarakat, paham dengan pola komunikasi yang dilakukan dalam suatu komunitas tertentu, apa lagi di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi politik pemerintah dalam upaya peningkatan partisipasi pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ngrandah, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Pendekatan riset ini adalah kualitatif. Metode risetnya adalah metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tahap observasi, wawancara mendalam, triangulasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui enam langkah: (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (2) membaca keseluruhan data; (3) menganalisis secara lebih detail melalui *coding*; (4) membuat tema berdasarkan hasil kategorisasi sesuai tujuan penelitian; (5) menyajikan laporan dalam bentuk deskripsi/narasi kualitatif; (6) menginterpretasikan atau memaknai data yang

sudah tersedia. Temuan penelitian adalah, pola komunikasi politik berlangsung dua arah, yaitu *top down* dan *bottom up*. Peran dari Kepala Desa cukup dominan. Kepala Desa memilih komunikasi dalam bentuk diskusi (dialog) dengan masyarakat secara transaksional, namun sayangnya partisipasi masyarakat desa Ngrandah dalam program dana bantuan BSPS masih rendah.

Kata Kunci: politik; komunikasi politik; partisipasi; pola komunikasi; pembangunan rumah

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan partisipasi pembangunan, peran komunikasi politik sangat penting. Semua aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan pemangku kepetingan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi politik. Namun masalahnya, tidak seluruh individu, kelompok dan masyarakat, paham dengan pola komunikasi yang dilakukan, seperti sering terjadi di perdesaan yang pola komunikasi politiknya cenderung bersifat menekan/koersif/*top down*. Akibatnya, menimbulkan jarak sosial antara para pelaku kebijakan dengan masyarakat perdesaan (Susanto, 2009).

Mengkaji pola komunikasi politik, misalnya, dalam upaya peningkatan partisipasi pembangunan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan dihadapkan pada bermacam masalah yang kompleks. Dimulai dari permasalahan ekonomi, sosial, politik dan hubungannya dengan perkembangan teknologi komunikasi yang dinamis, sehingga menyebabkan terjadinya alterasi sosial.

Pelaksanaan BSPS secara substansi berkaitan dengan masalah partisipasi pembangunan dan komunikasi politik (Susanto, 2009). Hal ini juga disampaikan Khalawi (2021): “Kementerian PUPR sangat membutuhkan dukungan dari anggota DPR untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Program BSPS. Program BSPS yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah memang menjadi salah satu program perumahan yang sangat diminati oleh masyarakat” (Patriela, 2021).

Kementerian PUPR melakukan Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, membahas dan mengevaluasi proses dan progress program BSPS. Secara individu, hal ini berhubungan dengan kedaulatan khalayak yang harus ditetapkan untuk mencukupi harapan hidup, dan memanfaatkan kedaulatan warga negara di semua lini, termasuk implementasi kedaulatan politik. Pada saat masyarakat masuk ranah demokrasi, maka peran dan tugas partai politik menjadi relevan, karena dalam sistem kenegaraan yang memegang teguh demokrasi, tidak dapat disanggah Partai Politik menduduki posisi strategis (Aly, 2010).

Kebijakan pembangunan partisipatoris yang dipilih oleh Pemerintah telah membawa peran yang signifikan bagi spesialis komunikasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan komunikasi difasilitasi oleh institusionalisasi kebijakan. Komunikasi partisipatif adalah konsep dan praktik yang melibatkan warga negara untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keinginan untuk mengejar agenda yang mereka pilih sendiri. Kreasi dan berbagi pengetahuan ini diekspresikan menggunakan berbagai media komunikasi yang menurut warga negara sesuai dan relevan dengan kehidupan mereka (Cornish & Dunn, 2009).

Ketan Chitnis (2011) menganalisis penerapan komunikasi partisipatif dalam program kesehatan yang disebut *Comprehensive Rural Health Project* (CRHP) di Jamkhed, India. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan komunikasi partisipatif melalui berbagi informasi untuk memetakan masalah bersama antara orang dalam dan orang luar, menciptakan pengetahuan kolektif dan memperkuat lingkungan yang berubah (Aminah, 2016).

Schramm (1977) menegaskan, media efektif untuk menyebarluaskan pesan/informasi. Media massa radio dan televisi berkesempatan untuk kontribusi pembangunan pedesaan di negara sedang berkembang. Kedua media elektronik tersebut, berpengaruh besar sekali untuk menyampaikan dan menyiarkan semua informasi/pesan pembangunan (Susanto, 2009).

M.A.T, seorang anggota DPR Komisi V yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah, menyatakan “sosialisasi program BSPS di tingkat Nasional dilakukan dengan berbagai saluran komunikasi, antara lain lewat *live streaming* di *plafform* media online, juga memanfaatkan *WhatsApp* grup sebagai salah satu cara menginformasikan program BSPS” (Wawancara, 30 April 2021).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Desa Ngrandah di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu wilayah perdesaan penerima BSPS. Warganya secara umum adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mencakup kualifikasi: (1) Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga; (2) Memiliki tanah dengan hak yang sah; (3) Belum memiliki rumah, atau menempati dan memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni; (4) Belum pernah memperoleh

BSPS; (5) Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan (6) Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

BSPS dilaksanakan oleh masyarakat penerima bantuan secara swadaya dengan membentuk KPB secara gotong royong, dan berkesinambungan dengan anggaran untuk Peningkatan Kualitas (PK) sebesar Rp 20 juta. Program tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan (SKP), Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT), serta Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya Ditjen Perumahan. Kegiatan BSPS di masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai prosedur dengan memperhatikan Instruksi Menteri PUPR tentang penanganan pencegahan Covid-19 (Suhaiela, 2020).

Program BSPS yang ditujukan untuk MBR telah menarik perhatian dan harapan masyarakat di Desa Ngrandah. Menurut penelitian Asminar (2019), animo masyarakat ikut program BSPS dapat dikatakan maksimal. Namun, mewujudkan rumah yang memadai untuk ditempati sendiri, tidak mudah. Masih ditemui adanya oknum yang menyatakan tidak mampu, tetapi kenyataannya berbeda. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lumolos (2019) yang menyatakan adanya beberapa komunitas yang masuk kategori mampu tetapi memperoleh program BSPS karena mereka memiliki kekerabatan dengan fasilitator.

Di sisi lain, hasil penelitian Arman (2016) tentang *Participatory Development Communication Approach* menemukan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni tidak sesuai dengan ketentuan program. Salah satunya, kurangnya komunikasi antara penyelenggara dengan tokoh masyarakat setempat, dan partisipasi masyarakat penerima stimulan masih rendah.

Pembangunan rumah layak huni membutuhkan dana yang tidak sedikit. Akibatnya sulit untuk membangun banyak rumah yang layak untuk masyarakat miskin (Widayanti, 2016).



Gambar 1. Rumah penduduk tidak layak huni
Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Permasalahan komunikasi politik yang dikaitkan dengan masalah partisipasi pembangunan rumah di perdesaan telah menarik banyak perhatian beberapa peneliti. Studi Muhingi et al., (2015) tentang *Political Communication for Sustainable Development in Kenya*, menyatakan, di mana ada komunikasi politik yang tepat dan efektif, pasti pembangunan berkelanjutan akan terwujud.

Penelitian Saragih (2017) tentang peran komunikasi politik pemerintahan dalam upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, menunjukkan pembangunan tidak maksimal dalam mensejahterakan masyarakat di perdesaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat sejak proses awal sampai akhir program, sehingga perencanaan tersebut disusun tidak sesuai dengan kebutuhan.

Temuan penelitian Yudhatama (2017) mengenai komunikasi politik dan partisipasi warga dalam arena perencanaan dan penganggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan: (1) Komunikasi politik yang terbangun antara pemerintah Propinsi dengan warga bersifat *top down* dan teknokratis; (2) Partisipasi warga relatif minim, karena adanya kebijakan yang tidak membuka ruang partisipasi; (3) Persepsi bahwa warga tidak perlu berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran karena yakin dengan kearifan Sultan selaku gubernur DIY. Dampak dari hal tersebut adalah sebagian besar program yang bersumber dari APBN diinisiasi dan dipimpin Pemerintah DIY dan cenderung menegasikan aspirasi warga.

Beberapa penelitian yang diuraikan di atas, jika dilihat dari subyek penelitian, memiliki kesamaan, mengkaitkan komunikasi politik dengan partisipasi pembangunan pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun obyek penelitiannya berbeda. Oleh karena itu, permasalahan kunci

dalam penelitian ini, adalah: (1) Bagaimana pola komunikasi politik Pemerintah yang berjalan dalam upaya peningkatan partisipasi pembangunan BPS di Desa Ngrandah, Kecamatan Sedan, Provinsi Jawa Tengah; (2) Bagaimana partisipasi warga dalam pembangunan BPS di Desa Ngrandah, Kecamatan Sedan, Provinsi Jawa Tengah?

Tujuan penelitian ini adalah mengamati dan menginterpretasikan kedalaman fenomena pola komunikasi politik Pemerintah yang berlangsung dalam upaya peningkatan partisipasi pembangunan BPS di Desa Ngrandah, Kecamatan Sedan, Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA TEORI

Secara otentik, menelaah persoalan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang dihubungkan dengan pola komunikasi politik tetap relevan (Susanto, 2009). Tehranian (1979) menjelaskan, ada tiga faktor teoritis yang berkaitan dengan pembangunan yaitu: (1) Pembangunan hanya sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik dan ekonomi dari suatu negara yang melaksanakan pembangunan; (2) Rasionalisasi adalah elemen penting dalam upaya pembangunan; (3) Ideologi yang timbul atas kesadaran diri masyarakat dari dunia ketiga (Susanto, 2009).

Dalam situasi ini, para komunikator yang memiliki otoritas politik ataupun *opinion leader* terlibat dalam permasalahan pembangunan perdesaan, jika menelaah persoalan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang dihubungkan dengan peran dari komunikasi politik (Susanto, 2009).

Komunikasi politik sifatnya *multi-disciplinary study*, terutama dalam kaitan antara proses komunikasi dan proses politik. Dalam konteks politik mengacu pada pendapat Graceau dalam Dan Nimmo (1993), proses politik merupakan pola interaksi yang menghubungkan antara warga negara dengan pembuat keputusan baik dalam konteks, kesetaraan, kerjasama ataupun dalam konteks konflik. Hal ini dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik (Yudhatama, 2017).

Jack Plano menyatakan, komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau partai politik. Namun, segala bentuk komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen (Saragih, 2017).

Dengan demikian, komunikasi politik merupakan suatu sistem komunikasi yang berkaitan dengan jaringan pemerintah dengan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Saragih, 2017).

Pola Komunikasi Politik Pemerintah

Dalam sistem politik, komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik (*The governmental political sphere*) dengan situasi kehidupan dalam infrastruktur politik (*Socio political sphere*). Infrastruktur politik terbagi dalam asosiasi-asosiasi, antara lain: partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), para tokoh politik (*political figures*), media komunikasi politik (*media of political communication*). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik berperan penting dalam komunikasi pembangunan. Keberhasilan komunikasi pembangunan sangat ditentukan oleh pola komunikasi politiknya (Aly, 2010).

Pola komunikasi politik sangat tergantung dari sistem politik yang dibangun dalam suatu masyarakat. Ada dua model pola komunikasi politik yang dikenal dalam kajian komunikasi politik yakni, (1) pola komunikasi politik horizontal, di mana posisi pelaku komunikasi yang terlibat dalam proses komunikasi politik relatif setara dan seimbang sehingga terjadi *sharing* atau saling berbagi informasi atau dialogis, bentuk atau pola komunikasi politik semacam ini hanya dapat terjadi dalam sebuah sistem politik yang demokratis; (2) pola komunikasi politik yang berbentuk vertikal atau *top down*. Arah komunikasi cenderung satu arah menunjukkan sistem politik yang merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan pola kepemimpinan yang totaliter (Panuju, 1994) dalam (Yudhatama, 2017).

Oleh karena itu, dalam sistem politik, komunikasi berperan untuk menghubungkan lingkungan aktivitas politik yang ada pada suprastruktur politik dengan situasi kehidupan dalam infrastruktur politik yang terdiri dari asosiasi-asosiasi, antara lain: partai politik, kelompok kepentingan, para aktor politik, saluran komunikasi politik. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik memiliki peran penting dalam

proses komunikasi pembangunan. Kesuksesan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan amat banyak ditentukan oleh pola komunikasi politiknya (Aly, 2010). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik. Sedangkan menurut Alfian (1993), komunikasi politik merupakan bagian dari sistem politik yang mengkonversikan aspirasi dan kepentingan para pihak menjadi berbagai kebijakan (Yudhatama, 2017).

Teori dan konsep inilah yang dijadikan perspektif dalam mengkaji pola komunikasi politik antara warga di satu sisi dan Pemerintah di sisi lain sebagai pelaku atau aktor komunikasi politik dalam arena kebijakan perencanaan program BSPS.

Partisipasi Pembangunan

Partisipasi Pembangunan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraspirasi, berdialog, dan bermusyawarah dengan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dalam pembangunan. Freire (1970) mengemukakan, partisipasi adalah sebuah pengalaman emansipatori yang menghasilkan kebebasan aktual. Freire menegaskan, dialog merupakan hal yang esensial pada proses penyadaran. Freire menggarisbawahi potensi yang luas dari dialog dan dengan semangat mempertahankan kekuatan bahasa sebagai alat yang mampu menanamkan dominasi maupun kebebasan. Tentu saja dialog dapat membawa seseorang untuk memaknai dunia dan mendorong transformasi sosial (Dagron, Gumucio, 2001).

Menurut Indardi (2016), aspek komunikasi dipercaya sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Mulyana (2007) menjelaskan, komunikasi dalam pembangunan harus berorientasi kerakyatan atau humanistik, yaitu menuntut dialog antara pihak-pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan, yaitu rakyat dan pemerintah (Sulaiman et al., 2017). Hal ini didukung oleh Hanuranto (2011) yang menuturkan, peningkatan akses komunikasi dan informasi memberikan pengaruh langsung pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi.

Komunikasi partisipatif adalah konsep dan praktik yang melibatkan warga negara untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keinginan untuk mengejar agenda yang mereka pilih sendiri. Kreasi dan berbagi pengetahuan ini diekspresikan menggunakan berbagai media komunikasi yang menurut warga negara sesuai dan relevan dengan kehidupan mereka (Cornish & Dunn, 2009).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (2009) penelitian kualitatif memfokuskan dengan berbagai metode yang meliputi pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajian. Jenis penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah diskriptif kualitatif (Yudhatama, 2017). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang dilakukan secara mendetail tentang latar belakang atau suatu subjek tunggal dalam suatu dokumen tempat aman pada suatu peristiwa tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Observasi. Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran tentang perilaku *interplay* dari proses komunikasi yang terjadi antara subjek yang akan dipelajari, sehingga diperoleh gambaran dan data yang utuh tentang implementasi program BSPS di Desa Ngrandah Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah; (2) Wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu informan kunci yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan/Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Tengah. Untuk menyeimbangkan informasi, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Ngrandah, dan tiga orang informan penerima BSPS. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang disiapkan, tidak terstruktur dan terbuka untuk mengemukakan pendapat dan pandangan *key informant* dan informan dengan bebas. Oleh karena itu peneliti mempunyai tugas yang tidak ringan agar membuat partisipan mau memberikan jawaban yang lengkap, mendalam, tidak ada yang disembunyikan (Cresswell, 2014); (3) Dokumentasi, berupa dokumen-dokumen yang digunakan dan relevan dengan penelitian, seperti profil Desa Ngrandah, mencatat penerima BSPS, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pelaksanaan program BSPS. Tujuannya adalah menggali data subjektif dan sistematis untuk memperoleh informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2012).

Analisis data, menurut (Creswell, 2013) dilakukan melalui enam langkah yaitu: (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Pada tahap ini, semua data yang diperoleh di lapangan dicatat dan dituangkan dalam bentuk transkrip wawancara; (2) membaca keseluruhan data. Pada tahap ini, peneliti menuliskan gagasan-gagasan umum dari para informan untuk mengetahui kedalaman informasi yang sudah tersedia; (3) menganalisis secara lebih detail melalui *coding* yang dilakukan berdasarkan topik penelitian; (4) membuat tema berdasarkan hasil kategorisasi sesuai tujuan penelitian; (5) menyajikan laporan dalam bentuk deskripsi/narasi kualitatif; (6) menginterpretasikan atau memaknai data yang sudah tersedia.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, pembangunan BSPS di Desa Ngrandah adalah fasilitasi pemerintah dalam hal bentuk bantuan stimulus untuk pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah untuk MBR yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri maupun berkelompok, meliputi perbaikan, renovasi atau perluasan, atau pembangunan rumah baru dan lingkungannya.

Peneliti melakukan penelitian untuk dapat mengetahui dan menginterpretasikan fenomena pola komunikasi politik dalam upaya peningkatan partisipasi pembanguna program BSPS di Desa Ngrandah tahun 2021.

Pola Komunikasi Politik Pembangunan Partisipasi BSPS

Pemerintah Pusat sebagai sumber informasi, memberikan informasi ke tingkat Provinsi dalam bentuk bantuan stimulus untuk pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah untuk MBR. Perumahan swadaya yang dimaksud adalah rumah-rumah mereka yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri maupun berkelompok, yang meliputi perbaikan, renovasi atau perluasan, atau pembangunan rumah baru dan lingkungannya. MBR sebagai penerima manfaat, dan karakter masyarakat.

Pola komunikasi yang berlangsung dalam pelaksanaan program BSPS menurut informan kunci, MMP, dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat sebagai pelaku kebijakan atau sumber informasi, kemudian informasi mengalir ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat Pemerintah Desa.

“Komunikasi terselenggara dengan dua cara, *top down* dan *bottom up*. Dialog *top down* berlangsung di saat awal, yakni saat proses pendaftaran calon penerima BSPS masuk ke proses verifikasi dan terpilih sebagai penerima bantuan. Komunikasi *bottom up*, baru berlangsung ketika penerima bantuan tengah melaksanakan proses” (wawancara, 2021).

Pernyataan informan kunci menggambarkan komunikasi hierarkis, dari tingkat hierarki tertinggi yaitu pemerintah pusat hingga provinsi, kemudian di tingkat terendah melalui kontak langsung, dari struktur pusat hingga pelaksana. Ini sebagian besar digunakan dalam memberi perintah, memberikan tugas, memberikan umpan balik dan praktik serta proses terkait tempat kerja yang diperlukan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja (Gbarale & Lebura, 2020).

Arah komunikasi atau aliran informasi tersebut memperlihatkan komunikasi terstruktur, yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam pekerjaan. Ini termasuk laporan kegiatan, komunikasi dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penyampaian pesan dalam pelaksanaan program BSPS dan bisa dikatakan bahwa pola komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi vertikal (Ruliana, 2016). Memang, dalam Komunikasi dan Pembangunan Politik, Lucian Pye mengatakan "aliran komunikasi menentukan arah dan laju perkembangan sosial yang dinamis". "untuk menganalisis semua proses sosial dalam hal struktur, isi, dan aliran komunikasi" (Paletz & Lipinski, 1994). Dengan demikian bisa dikatakan, pola komunikasi dalam pelaksanaan program bantuan BSPS berjalan melalui aliran informasi secara terstruktur dari atas ke bawah atau *top down*, dan dari bawah ke atas atau *bottom up*.

Berdasarkan penjelasan di atas, Kepala Desa Ngrandah menyatakan telah menerima informasi mengenai program BSPS dari Kelurahan lalu ke desa, selanjutnya diinformasikan kepada kelompok penerima BSPS. Sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu seperti yang dikemukakan oleh informan kunci yaitu Kepala Desa Ngrandah, SSU:

“Ada sosialisasi dulu. Bakal calon penerima itu kita undang, kita beritahu dengan kriteria seperti ini. Apabila masyarakat menyetujui ya kita hadirkan bahwa ini sebagai penerima tapi apabila keberatan ya kita carikan dari calon penerima yang lainnya” (wawancara tanggal 1 Mei 2021).



Gambar 2. Sosialisasi BSPS 2020 di Kabupaten Grobogan
Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari hasil sosialisasi pada masyarakat yang berada di Desa Ngrandah, khususnya penerima program BSPS, memperlihatkan keterbukaan dalam komunikasi yang dilakukan oleh informan SSU. Dalam pelaksanaan sosialisasi, informan berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan pembangunan mengenai tujuan pemerintah dalam memberikan bantuan stimulan, namun biaya yang diberikan tidak sepenuhnya. Sisanya ditanggung oleh masyarakat penerima bantuan dengan catatan, penerimanya BSPS namanya sudah terdaftar di data pemerintah, karena pemerintah memberikan program BSPS tidak serta merta semua usulan bisa diterima berdasarkan data dari pemerintah. Data itu dimasukan dengan kondisi warga memang benar-benar membutuhkan rumah yang layak. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut disampaikan pula oleh Kepala Desa:

“Desa Ngrandah dapat 30 rumah. Jaraknya jauh jauh, jadi per dusun itu kan ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4 jadi memang sesuai dengan kondisi lingkungan wilayah masing-masing. Jadi untuk mempermudah pembangunan dan mempercepat jadi saya melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa untuk membantu dalam proses pembangunan” (Wawancara, Mei 2021).

Kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan partisipatori pada program pemberian BSPS antara lain lewat forum monitoring dan evaluasi. Penerima BSPS secara rutin didampingi oleh TPK yang merupakan tenaga profesional pemberdayaan lokal dan menjadi penggerak, sekaligus pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS yang diawasi oleh Kepala Desa, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dalam membantu mengukur dampak program pada pemangku kepentingan, perlu menetapkan standar dan indikator yang jelas berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan program stimulan ini, tugas dan tanggung jawab pengurus KPM sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan bantuan BSPS adalah merencanakan dan menetapkan tempat pembelian bahan bangunan, dan pemindahan bukan penerima bantuan. Pengertian klausul yang mengatur tugas dan tanggung jawab pengurus KPT dapat diartikan bahwa tidak tertutup kemungkinan panitia mengikat masyarakat untuk membantu bersama dalam prosesnya, namun hal ini tidak dilakukan di Desa Ngrandah selama pelaksanaan program BSPS

Terkait komunikasi antara pengurus dan Kelompok Penerima Bantuan BSPS Desa Ngrandah dengan calon penerima bantuan stimulan sampai dengan berakhirnya program BSPS, kurang berjalan dengan baik. Seperti dikemukakan oleh beberapa informan penerima stimulan terjadi akibat kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok penerima manfaat pengurus KPB, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana ketentuan yang terdapat dalam program dan prosedur operasi pengadaan bahan bangunan. Hal ini dapat diartikan belum terjalinnnya komunikasi yang baik antara pengurus KPB dengan anggota kelompok penerima.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program tertentu, peran tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal sangat penting dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan menjadi panutan di lingkungan masyarakat, untuk mendukung keberhasilan suatu program. Terlebih pada masyarakat perdesaan, peran tersebut menjadi faktor penentu posisi tokoh-tokoh yang disegani dalam kehidupan

sehari-hari warga. Namun dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Ngrandah, seperti dikemukakan informan maupun, selama pelaksanaan program, tokoh masyarakat tidak terlibat dalam pengurus BSPS.

Media dan Partisipasi Penerima Program BSPS

Media memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan program BSPS, terutama untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pembangunan. Kementerian PUPR memberikan informasi mengenai program BSPS ke semua media massa dan media digital, agar kebijakan pemerintah diketahui oleh masyarakat luas, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Namun kenyataannya, Desa Ngrandah tidak memanfaatkan media untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BSPS, seperti dikemukakan SSU, Kepala Desa Ngranda.

“Langsung komunikasi dengan masyarakat *ndak* pake peliputan media, ya paling tidak lewat kelompok masing-masing kalau misalnya punya usulan punya gambaran punya ide-ide masukan lewat vlog-vlog” (Wawancara, Mei 2021).

Jelas, Desa Ngrandah tidak memanfaatkan media dalam melaksanakan program BSPS, tetapi lebih mengutamakan komunikasi yang sifatnya langsung melalui dialog, dan bersifat partisipatori. Komunikasi partisipatori terbentuk karena Kepala Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hak untuk berbicara yang berkaitan dengan pemberian stimulan dari pemerintah. Proses partisipatori menurut Nair dan White dalam Arman (2016) pada dasarnya adalah transaksional.

Komunikasi transaksional bukanlah proses persuasi satu arah. Itu merupakan dialog dimana pengirim dan penerima pesan berinteraksi dalam periode waktu tertentu, datang dan berbagi pemahaman. Sebagai contoh, ide baru atau praktek lebih disukai diadopsi jika penerima terlibat dalam dialog dan diskusi tentang kebutuhan mereka. Alternatif tindakan, dan penerimaan untuk menyelesaikan tujuan pembangunan. Jadi penggunaan media digital hanya sebatas usulan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Freire (1970) bahwa dialog merupakan hal yang esensial pada proses penyadaran.

Freire menggarisbawahi potensi yang luas dari dialog dan dengan semangat mempertahankan kekuatan bahasa sebagai alat yang mampu menanamkan dominasi maupun kebebasan. Tentu saja dialog dapat membawa seseorang untuk memaknai dunia dan mendorong transformasi sosial (Dagron, Gumucio, 2001). Demikian pula menurut Mulyana (2007), komunikasi dalam pembangunan harus berorientasi kerakyatan atau humanistik, yaitu menuntut dialog antara pihak-pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan, yaitu rakyat dan pemerintah.

Mendorong partisipasi MBR untuk kemandirian dalam pelaksanaan program ini sangat diperlukan, oleh karena itu program ini memprioritaskan masyarakat yang tidak memiliki rumah tinggal layak huni tetapi memiliki luas pekarangan sendiri, sudah mempunyai rencana untuk membangun dan mempunyai tabungan membeli bahan bangunan, dan atau masyarakat sudah mempunyai rumah sendiri tetapi tidak layak untuk ditempati.

Berikut ini adalah proses pembangunan rumah penerima manfaat BSPS. Terlihat adanya partisipasi dari masyarakat. Informan penerima manfaat bantuan stimulan, mengatakan:

“Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan pendampingan dan berusaha agar tidak ada kekurangan dalam menyediakan material” (Wawancara, Mei 2021)



Gambar 2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah
Sumber. Hasil Penelitian 2021

Faktanya, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Ngrandah pada tahun 2021 hanya sebagian saja yang merasa puas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta kurangnya partisipasi masyarakat secara swadaya dalam mensukseskan program ini. Hal itu terjadi karena adanya kecemburuan sosial atau keluhan dari masyarakat Desa Ngrandah yang tidak memperoleh dana bantuan BSPS. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Widayanti, 2016), bahwa pelaksanaan program BSPS dilihat dari parameter komunikasi masih belum efektif, disebabkan pada permasalahan atau keluhan dari kelompok sasaran yang berhubungan dengan dana bantuan, dan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan.

Temuan di lapangan, sebagaimana MBR di Desa Ngrandah penerima manfaat memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BSPS. Namun, ruang bagi mereka seolah-olah tertutup karena ketidaktahuan program tersebut. Mereka tidak sepenuhnya terlibat dalam keputusan untuk melaksanakan program.

Dalam penjelasan program BSPS pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perumahan Pemerintah disebutkan, penerima bantuan diharapkan dapat berpartisipasi dalam bentuk swadaya dan gotong royong dalam pelaksanaan program. Namun dalam prakteknya, menurut beberapa informan, mereka dalam melakukan suatu pekerjaan cenderung bekerja sendiri-sendiri karena minimnya orang yang membimbing masyarakat untuk bergotong royong dalam kegiatan tersebut. Artinya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BSPS di Desa Ngrandah rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan komunikator desa sebagai agen perubahan dalam mengkomunikasikan suatu inovasi atau program pengembangan seperti pelaksanaan BSPS, sehingga program ini tidak berjalan sesuai harapan.

Menurut Slamet dalam Mardikanto (2015), ada tiga elemen untuk menentukan peran serta masyarakat yaitu: (1) warga diberi kesempatan luas untuk berpartisipasi; (2) Kesadaran dan kemauan politik. Pimpinan mendorong dan membina partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemeliharaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan, mulai dari jajaran birokrasi pusat sampai yang paling bawah; (3) Kemauan orang untuk berpartisipasi, terutama ditentukan oleh sikap mental masyarakat untuk membangun atau meningkatkan taraf hidupnya; (4) Kemampuan komunitas untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kabupaten menyebarluaskan informasi program BSPS kepada masyarakat, dengan strategi *top down* dan *bottom up*. Artinya, informasi disampaikan kepada masyarakat melalui pemimpin masyarakat setempat dan masyarakat sapat memberikan *feedback* terhadap kebijakan tersebut; (2) pelaksanaan program BSPS di desa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena intansi teknis belum optimal mengkomunikasikan program kepada penerima bantuan. Mengkomunikasikan program BSPS kepada masyarakat hanya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, dengan cara melakukan komunikasi secara langsung melalui dialog tanpa menggunakan media komunikasi; (3) Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program BSPS. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pun terlaksana jika didukung dengan komunikasi yang baik antara para pelaku program, karena diyakini dengan komunikasi yang baik dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, B. (2010). Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(2), 246668. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.8.2>.
- Aminah, S. (2016). The Application of Participatory Communication in the Implementation of Small Farmers Empowerment Program. *Jurnal Bina Praja*, 08(01), 135–148. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.135-148>
- Arman. (2016). Participatory Development Communication Approach. *International Journal of Technical Research and Applications*, 4(6), 36–46.

- Asminar. (2019). Motivasi dan Swadaya Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 393–400. <http://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/JPM/article/view/306>
- Bahfein Suhaiela. (2020). *Tahun Ini, Program Perumahan Swadaya Jangkau 4.745 Lokasi di Indonesia*. KOMPAS.Com. <https://properti.kompas.com/read/2020/04/08/140000321/tahun-ini-program-perumahan-swadaya-jangkau-4.745-lokasi-di-indonesia>
- Cornish, L., & Dunn, A. (2009). Creating knowledge for action: The case for participatory communication in research. *Development in Practice*, 19(4–5), 665–677. <https://doi.org/10.1080/09614520902866330>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design. Qualitative, Quantitative, Mix Methods Approaches* (4 Edition). SAGE Publications Ltd. http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
- Dagron, Gumucio, A. (2001). Making Waves: Stories of participatory communication and social change. In *The Rockefeller Foundation, 420 Fifth Avenue, New York, New York 10018-2702*.
- Febrianti, M., Erwin, & Jendrius. (2020). Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 850–867.
- Gbarale, K. D., & Leburu, S. (2020). *Vertical Communication and Employee Performance in Emerging Economy Public Organizations : The Imperatives of Organizational Culture*. 6(6), 171–177. <https://doi.org/10.11648/j.ebm.20200606.16>
- Kriyantono. (2012). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Lumolos, J. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–7.
- Muhingi, W. N., Paul, S., & Bag-, P. O. B. P. (2015). Political Communication for Sustainable Development in Kenya. *Developing Country Studies*, 5(18), 57–65.
- Paletz, D. L., & Lipinski, D. (1994). *Political Culture and Political Communication*. https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_92.pdf?noga=1
- Patriela, Y. (2021). *Kementerian PUPR Minta Program BSPPS Gunakan Struktur Konstruksi yang Baik - Ekonomi Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210901/47/1436583/kementerian-pupr-minta-program-bspps-gunakan-struktur-konstruksi-yang-baik>
- Pitasari Nurina Dwi. (2019). Komunikasi Partisipatoris dalam Pembentukan Desa Wisata di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Lontar*, 7(2).
- Ruliana, P. (2016). *Komunikasi Organisasi, Teori dan Studi Kasus, Edisi Kedua*. RajaGrafindo Persada. <http://www.rajagrafindo.co.id/produk/komunikasi-organisasi/>
- Saragih, R. dan S. A. (2017). Peran Komunikasi Politik Pemerintahan Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana desa. *REFORMASI*, 7(1), 59–69.
- Sulaiman, A. I., Sugito, T., & Sabiq, A. (2017). Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 13(2), 233. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.734>
- Susanto, Ek. H. (2009). *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah. Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan* (A. C. W. Wardani (ed.)). Penerbit Mitra Wacana Media. [file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMEN BUKU 1.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMEN%20BUKU%201.pdf)
- Widayanti, R. (2016). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*.

Yudhatama, I. (2017). Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 205. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2172>